

Desain Sekolah Model: Studi Penjaminan Mutu Pendidikan

Jamaluddin *, Sopiah

Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Jl. Jambi-Muaro Bulian Km. 16 Simpang Sei Duren, Muaro Jambi, Jambi, Indonesia

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi penjaminan mutu dengan program sekolah model serta faktor-faktor dominan yang menyertainya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Latar penelitian ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jambi. Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan peran serta, dan studi dokumen guna menggali informasi dari informan kunci dan informan lainnya, serta kondisi ril lapangan. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data mengalir. Sementara itu untuk meningkatkan keabsahan data dilakukan triangulasi sumber dan metode, perpanjangan keikutsertaan, pemeriksaan sejawat, dan member cek. Hasil penelitian menemukan bahwa proses pelaksanaan pelatihan Program Pengembangan Sekolah Model meliputi tahapan sosialisasi dan koordinasi, pengusulan calon sekolah model dan sekolah imbas, penetapan sekolah model dan sekolah imbas, penyiapan dan seleksi Fasilitator Daerah (FASDA). Sedangkan tahapan pelaksanaan meliputi pelatihan, implementasi, pendampingan, pengimbasan, monitoring dan evaluasi, dan diseminasi. Kendala yang dialami pada pelaksanaan program pengembangan sekolah model yaitu faktor penghambat berupa dukungan dari pemerintah daerah berupa anggaran dan kinerja pengawas.

Kata Kunci: Sekolah Model, Penjaminan Mutu, Kebijakan Pendidikan

Abstract

[The Design of Model Schools: a Study of Quality Assurance In Education]. This study aims at describing the process of implementation of quality assurance system with model school program and its dominant factors. This research used a descriptive qualitative approach by meant of case study research design. The social setting of this research is the Quality Assurance Institution (LPMP) of Jambi Province. The informant consists of the Head of the Institution (key informant), the staff, and the head of the School. To collect data researcher employed in-depth interview, participant observation, and study document techniques. The data collected then analyzed by employing flow model analysis. Meanwhile, to improve the validity of the data, the researcher used triangulation of resources and methods, an extension of participation, peer checks, and member checks. The results of the study found that the process of preparing for development of school model consists of socialization and coordination, nomination, selection of school, and selection of district facilitator. The implementation of the program covered the following steps, they are training, assistance, scanning, monitoring and evaluation, and dissemination. The constraints of the Program include local government support and supervisory performance.

Key words: Model school program, quality assurance, educational policy

1. Pendahuluan

Pendidikan jika dilihat dari kondisi ilmiah hasil dari penelitian yang ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dibenahi sehingga Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi konsentrasi bagi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dan keputusan.

Sekolah beserta seluruh komponen didalamnya memiliki tanggungjawab dalam penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan di sekolah tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Peningkatan mutu secara utuh dalam pelaksanaan penjaminan mutu sekolah dibutuhkan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen sekolah untuk bersama-sama memiliki budaya mutu. Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan telah

*Penulis korespondensi
E-mail: jamaluddin@uinjambi.ac.id

dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam sekolah dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam sekolah disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan dan juga ditetapkan oleh satuan pendidikan untuk dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan. Agar pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan dengan optimal, perlu dikembangkan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, yang selanjutnya disebut **sekolah model**, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia.

Sekolah Model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain disekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum atau yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) penentuan sekolah ini bertujuan untuk mengetahui progres sekolah yang bersangkutan kedepannya apakah sekolah akan mengalami peningkatan dari sebelumnya. Dalam penentuan sekolah yang akan diutus untuk dibina pada program sekolah model yaitu melalui rapat koordinasi sekolah model yang dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan dengan mengundang Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Provinsi jambi beserta unsur pimpinannya.

Pada rapat tersebut maka masing-masing utusan dari dinas kabupaten kota yang ada dalam Provinsi Jambi beserta unsur pimpinannya merekomendasikan sekolah yang akan dipilih untuk dijadikan sebagai sekolah model, dengan ketentuan mengutus: 2 Sekolah Dasar Negeri, 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri, 1 Sekolah Menengah Atas Negeri dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

Sekolah yang telah ditetapkan oleh masing-masing Dinas Kabupaten Kota beserta unsur pimpinannya tersebut diatas kemudian akan dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya

untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sekolah model sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lainnya yang akan menerapkan penjaminan mutu sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di provinsi jambi.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan sebuah lembaga yang bertujuan agar pelaksanaan pendidikan di Provinsi Jambi sesuai dengan standar, norma, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. LPMP Provinsi Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depditanas yang dalam pelaksanaan kegiatannya secara teknis dikoordinasikan oleh Dit Tendik.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut LPMP Provinsi Jambi pada unit bagian Sistem Informasi merancang program jangka panjang yaitu dengan melaksanakan Workshop Pengembangan Sekolah Model Tahap I untuk mempersiapkan implementasi penjaminan mutu satuan pendidikan tahun 2016 dengan menerapkan pada sekolah model dan sekolah imbas yang memiliki sepuluh rangkaian yang telah disusun oleh Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LPMP Jambi yang wajib dilakukan oleh peserta pelatihan program pengembangan Sekolah model

Menurut Meirawan (2010) quality assurance telah menjadi syarat penting kualitas pendidikan di era otonomi daerah di Indonesia karena akan memiliki efek positif pada pengembangan sekolah di tingkat regional dan menghasilkan standarisasi kualitas di tingkat nasional. Simarmata (2017) kelemahan mutu pendidikan dapat dilihat dari indikator pertama adalah angka partisipasi pendidikan dan kedua adalah nilai rata-rata UN yang masih relatif rendah secara nasional. Menyadari hal ini, pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai usaha peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Di antaranya adalah peningkatan anggaran pendidikan, mensertifikasi guru-guru, menyediakan berbagai fasilitas, dll. Namun, semua usaha ini dirasakan belum maksimal. Namun berbagai usaha yang telah dilakukan pemerintah lebih cenderung bersifat eksternal. Artinya, usaha peningkatan mutu pendidikan berasal dari luar sekolah bukan dari sekolah tersebut. Disadari bahwa usaha peningkatan mutu akan lebih efektif bila dilakukan secara internal. Dengan kata lain, sekolah yang bersangkutan melakukan

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memaparkan proses penjaminan mutu pendidikan di lembaga penjaminan mutu pendidikan serta mengungkap faktor-faktor dominan dibalik pelaksanaan sekolah model. Letar penelitian ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi dengan pertimbangan bahwa Lembaga ini menjadi salah satu

lembaga yang bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan melalui beberapa program unggulan yang diluncurkan. Guna memperoleh data, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam bersama informan kunci yaitu Pimpinan Lembaga ditamba beberapa informan lainnya, sedangkan pengamatan partisipasi dilakukan di lembaga guna menyelami proses penjaminan mutu dan perilaku orang-orang di dalamnya, khususnya dalam pelaksanaan program sekolah model, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data dokumentasi terkait pelaksanaan program sekolah model.

Sementara itu, data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data mengalir (*flow model analysis*) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984). Guna meningkatkan keterpercayaan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, perpanjangan keikutsertaan, member cek, dan pemeriksaan seawat.

3. Temuan dan Pembahasan

a. Profil Lembaga

Kedudukan LPMP sebagai Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan diperkuat oleh PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 No. 24 yang menyatakan “ *Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen yang berkedudukan di Provinsi dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk Supervisi, Bimbingan, Arahan, Saran, dan Bantuan Teknis kepada satuan Pendidikan Dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan* ”.

Oleh karena itu LPMP sebagai unit pelaksana Teknis Edukatif di bidang Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan proses pengumpulan dan pengolahan serta pengembangan sistem informasi, pemetaan mutu dan supervisi pendidikan, dan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan di provinsi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak tahun 1992 kelembagaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (dahulu Balai Penataran Guru) sudah beberapa kali mengalami perubahan.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2013, LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
- 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
- 3) Supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
- 4) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- 5) Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- 6) Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, LPMP Provinsi Jambi melakukan koordinasi dengan unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Perguruan Tinggi, dan instansi lainnya terkait dengan pengelolaan pendidikan, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi LPMP Provinsi Jambi sebagai penjaminan mutu pendidikan harus didukung oleh sumber data kependidikan yang valid, sumber data dimaksud berupa profil data PTK dan satuan pendidikan, hasil pemetaan mutu, hasil fasilitasi penjaminan mutu, serta kependidikan lainnya. Adapun sumber data kependidikan tersebut berfungsi sebagai acuan strategis dalam merumuskan program pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan di provinsi Jambi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan tujuan pendidikan, diawali dengan melakukan penataan dan pembenahan kondisi riil Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dimulai dari pemerataan kebutuhan guru, sertifikasi, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi guru, dan pemberian penghargaan dan perlindungan bagi jabatan guru.

Sebagai penyedia data tentang kependidikan khususnya data Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi sejak tahun 2003 telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIMPTK) yang dilaksanakan melalui optimalisasi fungsi Seksi Data dan Informasi (sekarang Seksi Sistem Informasi). Program SIMPTK pada akhir tahun 2006 telah mengeluarkan Laporan Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Jambi, namun dari beberapa kajian mendalam tentang cara kerja dan sistem SIM tersebut bila dibandingkan dengan keadaan riil guru dilapangan, dimana seorang guru pada umumnya dapat mengajar di dua sekolah atau lebih, yang dalam pelaporannya dapat menyebabkan perhitungan ganda (*double counting*). Analisis tersebut, maka

dikembangkan pada tahun 2007 yaitu SIM NUPTK dengan prinsip dan cara kerja :

- 1) Guru dapat mengisi data di sekolah lebih dari satu dengan syarat harus menentukan sekolah induk (satminkal).
- 2) Guru harus mengisi lengkap data yang mutlak dipersyaratkan diisi dan tidak boleh kosong, data tersebut merupakan data yang sudah melekat pada individu dan tidak akan pernah berubah lagi misal : nama guru, tempat dan tanggal lahir, nama ibu kandung, sekolah dasar dan tahun tamat, jenis kelamin, dan sekolah induk. Data tersebut berguna untuk mendeteksi/filtering seorang guru dikatakan double counting atau tidak.
- 3) Pengakuan atas kebenaran data maka guru yang bersangkutan akan diberi nomor tertentu yaitu Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari 16 digit. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada saat ini diberlakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan termasuk Dinas Pendidikan untuk menjadi persyaratan yang harus diisi oleh guru apabila akan mengikuti program-program yang berhubungan dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

3. Temuan dan Pembahasan

a. Proses Pelaksanaan Program Pelatihan Pengembangan Sekolah Model

Dalam setiap aktifitas yang akan dilakukan agar lebih terarah pada apa yang harus dikerjakan maka terlebih dahulu kita harus mempunyai persiapan yang matang dari sebelumnya sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sama halnya dengan proses pelaksanaan pelatihan pengembangan sekolah model yang dilakukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi sebelum melakukan proses pelatihan pengembangan sekolah model telah mempersiapkan apa saja hal-hal yang harus dilakukan selama mengikuti pelatihan program pengembangan sekolah model di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi dan koordinasi

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Fasilitator Nasional (FASNAS) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi diantaranya Drs. Mas'li, M.Pd DKK dengan mengundang perwakilan pemerintah daerah (dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota) untuk mensosialisasikan tentang penerapan penjaminan mutu pendidikan dengan mengembangkan sekolah model dan pola pengimbasannya. Materi kegiatan sosialisasi dan koordinasi meliputi:

- a) Pemahaman umum sistem penjaminan mutu pendidikan
Materi ini menjelaskan bahwa telah dirancang suatu sistem untuk menjamin mutu pendidikan dan bagaimana sistem penjaminan mutu tersebut dijalankan.
- b) Peran pemerintah daerah dalam penjaminan mutu pendidikan
Materi ini menjelaskan bagaimana bentuk peranan pemerintah daerah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan dan perlu dibentuk tim penjaminan mutu daerah oleh pemerintah daerah, tim ini nantinya berkoordinasi dengan LPMP dalam rangka sinergisitas mutu pendidikan daerah masing-masing.
- c) Pemahaman dan pelaksanaan sistem penjaminan di sekolah (SPMI).
Materi ini menjelaskan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan yaitu sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh sekolah. Dalam materi ini dijelaskan bahwa sekolah merupakan pilar utama penjaminan mutu pendidikan dan bagaimana siklus penjaminan mutu pendidikan di sekolah dilakukan.
- d) Pengenalan konsep sekolah model dan pengimbasannya
Materi ini menjelaskan bagaimana konsep pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan yang akan dilakukan oleh LPMP sebagai upaya pemerintah dalam rangka pemberian layanan yang bermutu.
Materi tersebut dapat disampaikan selama ± dua hari penuh waktu dengan metode penyampaian materi dilakukan dengan metode ceramah interaktif dalam bentuk rapat koordinasi. Peserta pemerintah daerah diharapkan meneruskan informasi kepada pemangku kepentingan daerah agar dapat mendukung penjaminan mutu pendidikan serta kepada sekolah-sekolah untuk menginformasikan adanya program pengembangan sekolah model penjaminan mutu pendidikan. LPMP harus menindaklanjuti kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang telah dilakukan. Hasil koordinasi dapat berupa:
 - a) Pernyataan dukungan dari pemerintah daerah
 - b) Kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah dan LPMP untuk menjalankan pengembangan sekolah model dan pengimbasan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di daerahnya.
 - c) Kesepakatan kerjasama antara pemerintah daerah dan LPMP untuk menjalankan pengembangan sekolah model dan pengimbasan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di daerahnya.
 - d) Komitmen penyediaan anggaran peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah.
 - e) Pembentukan tim penjaminan mutu pendidikan daerah yang independen untuk membantu pemerintah daerah dalam menjamin mutu pendidikan pada daerah masing-masing (provinsi/kabupaten/kota).

- f) Rekomendasi fasilitator daerah untuk dibantu dalam menerapkan sekolah model dan pengimbasannya.

2) Pengusulan calon sekolah model dan sekolah imbas

Pada tahun 2016 dalam rapat koordinasi dan sosialisasi, penanggung jawab program pelatihan pengembangan sekolah model Nurrahman mengatakan “ bahwa LPMP Provinsi Jambi menetapkan 6 sekolah yang akan dijadikan sebagai sekolah model yaitu terdiri dari jenjang SD 2 (dua), SMP 2 (dua), SMA 1 (satu) dan SMK 1 (satu) yang akan diusulkan oleh dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota sebagai calon sekolah model ”.

Selanjutnya daftar usulan sekolah diserahkan oleh pemerintah daerah kepada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi.

3) Penetapan sekolah model dan sekolah imbas

Pengusulan daftar sekolah model beserta sekolah imbasnya ditindaklanjuti oleh LPMP dengan dibantu oleh tim dari pemerintah daerah. Proses tindak lanjut oleh LPMP berupa verifikasi dan validasi. Proses ini dapat dilakukan dengan kunjungan sekolah, pencocokan dokumen sekolah dengan data pokok pendidikan, survey petugas LPMP ke sekolah untuk mengukur kondisi awal sekolah, Focus Group Discussion dengan seluruh komponen dari calon sekolah untuk mengetahui komitmen dan kesungguhan mereka. Hasil verifikasi dan validasi LPMP dilaporkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengusulkan daftar baru jika terdapat sekolah yang tidak dapat memenuhi proses verifikasi dan validasi yang kemudian akan ditindaklanjuti kembali oleh LPMP.

4) Penyiapan dan seleksi Fasilitator Daerah (FASDA)

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan sekolah model dan pengimbasan meliputi pelatihan, implementasi dan pendampingan hingga monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, LPMP perlu menyiapkan fasilitator daerah yang menguasai sepenuhnya terkait sistem penjaminan mutu pendidikan, implementasi SPMI, pengembangan sekolah model, dan pola pengimbasannya. Fasilitator daerah memiliki bertugas untuk melakukan serangkaian kegiatan pengembangan sekolah model dan pengimbasannya pada daerah masing-masing.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan program pelatihan pengembangan sekolah model adalah sebagai berikut:

1) Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pelatihan dilaksanakan di LPM Jambi yang dilatih oleh Tim Fasilitas Nasional (FASNAS) yaitu petugas LPMP yang telah dilatih ditingkat pusat kemudian dilatih lagi kepada pegawai LPMP dengan melibatkan fasilitator daerah atau tim penjaminan mutu pendidikan dengan pola “whole school approach”. Pelatihan SPMI dirancang sefleksibel

mungkin baik dari sisi materi maupun metode pelatihan sehingga dapat diikuti oleh semua peserta dari berbagai level. Oleh karena itu, ruang lingkup pelatihan tidak hanya tersampainya substansi yang harus diterima oleh peserta pelatihan namun juga termasuk keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pelatihan untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penerapan penjaminan mutu internal di sekolah.

Materi pelatihan SPMI diambil dari pedoman pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang disusun oleh tim penjaminan mutu pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Secara substansi ruang lingkup pelatihan meliputi:

- a) Pemahaman tentang sistem penjaminan mutu pendidikan
- b) Pemahaman tentang penerapan penjaminan mutu internal sekolah.
- c) Pendalaman tentang bagaimana menerapkan siklus penjaminan mutu internal mulai dari memetakan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi hingga penetapan standar baru serta strategi baru.
- d) Pembentukan tim penjaminan mutu sekolah sebagai
- e) penanggungjawab aktivitas penjaminan mutu di sekolah. Pendalaman bagaimana melakukan pengimbasan praktek penjaminan mutu internal kepada sekolah lain.
- 6) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sistem penjaminan mutu internal di sekolah harus dilakukan oleh seluruh anggota sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah sesuai tugasnya masing-masing, siswa dan lainnya. Ada lima tahapan siklus yang harus dilaksanakan yaitu:

Pertama, memetakan mutu sekolah melalui kegiatan evaluasi dirisekolah. Kegiatan ini penting untuk melibatkan seluruh anggota sekolah dan masyarakat di luar sekolah untuk mendapatkan informasi dan evaluasi dari berbagai sisi. Visi, misi dan tujuan sekolah dapat direvisi dan dikembangkan sesuai hasil pemetaan ini. Hal ini penting karena visi, misi dan tujuan merupakan pusat pengelolaan sekolah dan alat ukur untuk memenuhi harapan sekolah. Sebuah organisasi berupa tim penjamin mutu pendidikan perlu dibentuk untuk mengelola sistem penjaminan mutu pendidikan internal secara profesional.

Kedua, membuat perencanaan peningkatan mutu sekolah, termasuk manajemen, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sumberdaya manusia dan dukungan infrastruktur. Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama disamping dokumen kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan standar nasional pendidikan, serta dokumen rencana strategis pengembangan sekolah. Ketiga, pelaksanaan program penjaminan mutu pelaksanaan program penjaminan mutu

sekolah. Pedoman ini akan memandu anggota sekolah bagaimana menerapkan proses pembelajaran (mengembangkan materi dan pendekatan proses pembelajaran), kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang berkaitan dengan program penjaminan mutu sekolah. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa akan belajar bagaimana menerapkan pembelajaran interaktif dan integratif melalui pendekatan ilmiah untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan perilaku.

Keempat, monitoring dan evaluasi. Pedoman ini memberikan arahan bagaimana untuk memantau dan mengevaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan. Hal-hal yang dimonitoring dan evaluasi secara umum dilihat dari aspek manajemen, proses belajar dan hasilnya, dan kegiatan ekstrakurikuler dan hasilnya, dampak penjaminan mutu sekolah terutama pengetahuan, keterampilan dan perilaku perubahan anggota sekolah, dukungan *stakeholder* dan keterlibatan masyarakat.

Kelima, penetapan standar baru dan penyusunan strategi baru. Penyusunan strategi perlu dilakukan jika sekolah belum mampu mencapai SNP berdasarkan strategi sebelumnya. Sekolah yang telah mampu memenuhi standar nasional pendidikan dapat menetapkan standar baru di atas standar nasional pendidikan. Sekolah dapat mempelajari pedoman pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang telah diberikan dan dilatihkan dalam pelatihan SPMI dalam mengimplementasikan SPMI.

2) pendampingan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Supaya seluruh komponen sekolah model dapat mengimplementasikan penjaminan mutu internal, sekolah membutuhkan pendampingan dari fasilitator. Pendampingan diimplementasikan di setiap sekolah model secara bergantian. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal LPMP melakukan pendampingan sel 1 kali dalam satu semester. Tim SPMI mendampingi dokumen apa yang sudah dibuat lanjutan dari pelatihan yang telah dilakukan di LPMP Jambi contohnya yang telah sudah seperti: 1. Standar proses harusnya pihak sekolah melanjutkan sampai pada 8 standar nasional pendidikan. Kemudian di cross check oleh tim spmi LPMP jambi melalui pendampingan mana diantara dokumen-dokumen yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah itu terpenuhi mana yang masih belum terpenuhi.

3) Pengimbasan.

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam melakukan pengimbasan. Perwakilan sekolah imbas diundang untuk ikut dalam proses pendampingan di sekolah model. Setelah dilakukannya pendampingan maka ada pola pengimbasan, pola pengimbasan ini dilakukan oleh sekolah model dengan mengimbas ke sekolah-sekolah yang ada disekitarnya dengan syarat sekolah imbas itu hanya boleh dalam satu gugus, contohnya jika SD, SD tersebut harus satu gugus dengannya

kemudian mengundang lima sekolah. Satu sekolah model itu mengimbas kelima sekolah lainnya.

4) Monitoring dan evaluasi

Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal LPMP Jambi melakukan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2016 pada bulan desember lalu dengan cara memberikan instrumen yang harus diisi oleh sekolah untuk melihat sampai sejauh mana mereka memahami sekolah model, kendala apa yang dihadapi lalu dianalisis. Dari hasil analisis itu akan terlihat apakah ada permasalahan atau tidak dalam implementasi sekolah model yang nantinya akan menjadi masukan pada tahun yang akan datang.

5) Diseminasi

Diseminasi ini merupakan penyampaian hasil atau tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi. Yang harus dipersiapkan adalah terkait dengan sosialisasi dan koordinasi, pengusulan dan penetapan.

b. Faktor Penghambat/kendala dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Sekolah Model

Setiap apapun kegiatan yang akan dilaksanakan maka sudah tentu akan ada kendala yang ditemukan meskipun dalam konteks masalah yang kecil. Dalam hal ini secara khusus peneliti mengamati terdapat dua kendala yang ditemukan dalam program pelatihan pengembangan sekolah model yaitu sebagai berikut:

1) Dukungan dari pemerintah daerah.

Salah satu kendala dalam pengembangan sekolah model adalah dukungan pemerintah daerah, misalnya fasilitasi bagi sekolah dalam hal pemenuhan standar nasional pendidikan, kemudian penganggaran dana untuk kegiatan-kegiatan sekolah model yang salah satu kegiatannya adalah proses pengimbasan, pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. Dukungan ini diperlukan dikarenakan sosialisasi kegiatan sekolah model belum secara utuh dilakukan, sebab program pengembangan sekolah model ini merupakan kegiatan baru dari Ditjen Dikdasmen yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan pada tahun 2016 lalu dan bisa jadi juga dikarenakan program pengembangan sekolah model ini mulai dilakukannya pada pertengahan tahun 2016 sementara penyusunan anggaran dilakukan di awal tahun. Berdasarkan hasil penelitian dari Justi yang menjelaskan. Sekolah model juga belum dapat melaksanakan proses pengimbasan kepada sekolah imbas, yang bisa dilakukan proses pengimbasannya hanya sebatas sosialisasi saja, semestinya juga harus diteruskan dengan pola pendampingan seperti yang sudah dilakukan pada saat pelatihan pengembangan sekolah model yang telah usai dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi, namun itu semua juga tetap harus dibantu atau

didukung oleh pemerintah daerah masing-masing ” (Wawancara, Justi, 2016).

Kondisi ini berimplikasi terhadap implementasi sekolah model yang akan melaksanakan proses pengimbasan ke sekolah-sekolah yang ada disekitarnya. sehingga program pengembangan sekolah model belum secara optimal dapat diterapkan di sekolah-sekolah model yang ada di masing-masing daerah di Provinsi Jambi. Melihat dari proses tahapan-tahapan dalam kegiatan sekolah model tentunya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta praktisi-praktisi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bermutu secara merata di masing-masing daerah yang ada di Provinsi Jambi.

Persoalan lain yang terkait adalah terdapat beberapa pengawas pada saat pelatihan dapat mengikuti kegiatan dengan baik, namun ketika melakukan bimbingan di sekolah model mereka (pengawas) memiliki keterbatasan seperti wawasannya terhadap sekolah model belum sepenuhnya manatap. Pengawas juga disibukkan dengan urusan kepengawasannya masing-masing sehingga untuk membina sekolah model belum bisa optimal dilakukan.

Belum optimalnya eksistensi pengawas dalam menjalankan program sekolah model di daerahnya dikarenakan kesibukan personal yang menjadi rutinitas kesehariannya sehingga menjadi penghambat untuk kelancaran implementasi sekolah model di daerahnya. Sesungguhnya memang tidaklah mudah untuk menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan tugas yang diberikan tetapi itu sudah menjadi tuntutan pekerjaan yang harus dan wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemangku kepentingan guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam penerapannya di lapangan.

c. Optimalisasi Program Sekolah Model

Upaya optimalisasi program sekolah model dilakukan dengan beberapa aktivitas, diantaranya; pertama pihak Lembaga mengadakan RAKOR dan Sosialisasi Bimtek SPME artinya mengundang Dinas kabupaten/kota pada saat pada saat level rapat koordinasi (Rakor) serta mengajak mereka terlibat pada saat pertemuan, lalu penanggung jawab program mensosialisasikan apa itu sekolah model, apa saja tahapan-tahapan yang harus dijalankan kemudian Tim Fasilitator Daerah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan ke sekolah model yang ada daerah-daerah dengan menghadirkan sekolah imbas agar semua mengerti apa itu sekolah model dan bagaimana pola pengimbasannya, kemudian akan dilakukannya sosialisai/bimbingan teknis Sistem Penjaminan Mutu Eksternal kepada Pemerintah Daerah dengan harapan setelah diketahuinya bagaimana bentuk dari program sekolah model ini nantinya akan mendapat dukungan secara utuh dari pemerintah daerah tetapi untuk sosialisai/bimbingan teknis Sistem Penjaminan

Mutu Eksternal ini dilakukan pada tahun 2017 saat ini. Kedua, melakukan pendampingan sekolah model dengan mengoptimalkan melibatkan pengawas sekolah dan seluruh warga sekolah untuk berkomitmen tinggi dalam menjalankan program pengembangan sekolah model sehingga sekolah model dapat diimplementasikan secara meluas.

Lembaga penjaminan mutu pendidikan telah melakukan upaya terhadap kendala yang ditemukan pada proses pelaksanaan pengembangan sekolah model sudah mendekati usaha yang maksimal ditandai dengan pihak LPMP melakukan perbaikan dari kendala-kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan program pengembangan sekolah model tahap I di tahun 2016 yang tercatat dalam dokumen Monitoring dan Evaluasi sebagai perbaikan untuk tahap selanjutnya.

Sekolah model sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal merupakan wujud dari program yang dilakukan oleh pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi. Program Pengembangan sekolah model yang dilakukan di lembaga penjaminan mutu pendidikan Jambi Tahun 2016 lalu sudah melewati seluruh tahapan-tahapan yang harus dipenuhi seperti yang diterangkan pada bab sebelumnya telah mampu mewujudkan 6 sekolah per Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai sekolah model, dalam jumlah keseluruhannya terdapat 66 sekolah model yang ada di Provinsi Jambi terdiri dari 2 SD, 2 SMP, 1 SMA dan 1 SMK. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan di lembaga penjaminan mutu pendidikan Jambi dalam meningkatkan mutu secara utuh yang melibatkan pendekatan seluruh komponen sekolah untuk bersama-sama memiliki budaya mutu telah nyata dilaksanakan dalam program pengembangan sekolah model yang melibatkan Kepala sekolah, Guru-guru, Pengawas dan tenaga kependidikan.

Pelaksanaan program tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Mulyasana, 2011 hlm 135-136) *tentang konsep penjaminan mutu dalam manajemen mutu pendidikan*, yang menerangkan bahwa penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu yaitu: Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Nasional Pendidikan (SNP) Standar mutu pendidikan di atas SNP yang dipilih satuan atau program pendidikan formal. Ketiga standar tersebut dijadikan sebagai acuan mutu satuan atau program pendidikan formal. Teori di atas memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis karena data yang penulis sajikan bisa dihubungkan serta ada kaitannya dengan studi literatur dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang telah mantap mengkaji tentang penjaminan mutu pendidikan.

Proses pelaksanaan dalam bentuk kegiatan apapun tentu sudah menjadi hal yang sangat umum dari segi kendala yang sebelumnya tidak diduga akan menjadi hambatan ringan atau berat dalam suatu

pelaksanaan kegiatan sama halnya dengan pelaksanaan program pengembangan sekolah model yang dilakukan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi juga tidak terbebas dari kendala yang dihadapi yaitu dalam hal dukungan dari pemerintah daerah dari segi anggaran dan dukungan pengawas perlu menjadi perhatian pada saat menjalankan program pengembangan sekolah model didaerahnya.

Faktor penghambat yang ditemukan pada proses pelaksanaan sekolah model yang dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi diatas sesuai dengan pendapat Cuttance (dalam Ali, 2000; 32) dikutip dari Mahmud (2012) proses penjaminan mutu harus dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip bahwa mutu bukan hanya menjadi tanggung jawab pimpinan melainkan menjadi tanggung jawab semua orang dalam organisasi. Melakukan tindakan yang benar pada tahapan pertama berarti, dan mencegah terjadinya kesalahan, menunda pekerjaan dapat berakibat fatal bagi seluruh proses manajemen. Oleh karenanya pencegahan lebih baik dibanding dengan menanggulangi dan memperbaiki kesalahan. Paparan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) adalah aturan-aturan yang sudah dibakukan untuk dijalankan dalam operasional sebuah lembaga pendidikan yang menjadi landasan dasar dalam melaksanakan tugas dan kebijakan ataupun dalam menentukan suatu keputusan.

Faktor penghambat yang ditemukan dalam segala proses pelaksanaan kegiatan tentu secepatnya harus ditindaklanjuti dan diperbaiki agar suatu kegiatan yang dilaksanakan terhindar dari kendala-kendala yang akan muncul setelahnya, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi khususnya pelaksana kegiatan Pengembangan Sekolah Model telah mencari upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yakni dengan cara. Pertama, mengundang Dinas Kabupaten/kota pada saat Rakor dan Sosialisasi Bimtek SPME, yaitu pihak Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jambi mengundang dinas kabupaten/kota pada level rapat koordinasi (Rakor) serta mengajak mereka terlibat pada saat pertemuan, lalu penanggung jawab program mensosialisasikan apa itu sekolah model, apa saja tahapan-tahapan yang harus dijalankan kemudian Tim Fasilitator Daerah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan melakukan pendampingan ke sekolah model yang ada daerah-daerah dengan menghadirkan sekolah imbas agar semua mengerti apa itu sekolah model dan bagaimana pola pengimbasannya, kemudian akan dilakukannya sosialisai/bimbingan teknis Sistem Penjaminan Mutu Eksternal kepada pemerintah daerah dengan harapan setelah diketahuinya bagaimana bentuk dari program sekolah model ini nantinya akan mendapat dukungan secara utuh dari pemerintah daerah tetapi untuk sosialisai/bimbingan teknis Sistem Penjaminan

Mutu Eksternal ini dilakukan pada tahun 2017 saat ini.

Kedua, melakukan pendampingan sekolah model dengan mengoptimalkan melibatkan pengawas sekolah dan seluruh warga sekolah untuk berkomitmen tinggi dalam menjalankan program pengembangan sekolah model sehingga sekolah model dapat diimplementasikan secara meluas. Lembaga penjaminan mutu pendidikan Jambi melakukan upaya terhadap kendala pada pelaksanaan pengembangan sekolah model sudah mendekati usaha yang maksimal ditandai dengan pihak LPMP melakukan perbaikan dari kendala-kendala yang dialami dalam proses pelaksanaan program pengembangan sekolah model tahap I di tahun 2016 yang tercatat dalam dokumen Monitoring dan Evaluasi sebagai perbaikan untuk tahap selanjutnya. Cuttance berpendapat (dalam Ali, 2000; 32) proses penjaminan mutu harus dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip-prinsip diantaranya yaitu keberhasilan melaksanakan manajemen pada suatu proses sangat ditentukan oleh iklim organisasi, yaitu organisasi dan tim kerja yang kompak. Dengan berkomunikasi dan bekerja sama semua orang mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan waktu yang tepat, dimana dan dengan siapa setiap orang harus berhubungan. Teori yang dikemukakan oleh tokoh diatas sejalan dengan upaya dalam mengatasi kendala yang ditemukan pada proses pelaksanaan pengembangan sekolah model di lembaga penjaminan mutu pendidikan jambi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, LPMP Jambi sebelum melakukan proses pelatihan pengembangan sekolah model telah mempersiapkan apa saja hal-hal yang harus dilakukan selama mengikuti pelatihan program pengembangan sekolah model sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dirjendikdasmen meliputi sosialisasi dan koordinasi, pengusulan calon sekolah model dan sekolah imbas, penetapan sekolah model dan sekolah imbas, penyiapan dan seleksi Fasilitator Daerah (FASDA). Sedangkan tahapan awal pelaksanaan meliputi; pelatihan sistem penjaminan mutu internal, implementasi sistem penjaminan mutu internal, pendampingan sistem penjaminan mutu internal, pengimbasan, monitoring dan evaluasi, dan diseminasi. Terdapat dua kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program pengembangan sekolah model yaitu Pelaksanaan sekolah model belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan dukungan pengawas terhadap pembinaan/bimbingan sekolah model perlu menjadi perhatian karena belum optimal dilaksanakan di sekolah yang ada di daerahnya.

Daftar Pustaka

- Anonim (2015). Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia
- Azis, A. (2017). Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 10(2).
- Chairunnisa, C. (2016). *Manajemen pendidikan dalam multi perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Lexy, M. (2004). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Lias Hasibuan. (2004). *Melejitkan Mutu Pendidikan*. Jambi: SAPA Project
- Mahmud, M. (2012). *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Makbulloh, D. (2016). *Pendidikan islam dan sistem penjaminan mutu menjupendidikan berkualitas di indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Meirawan, D. (2010). Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan. *educationist*, 12.
- Mulyasa. (2015). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasana, D. (2011). *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peteunjuk Teknis Pengembangan Sekolah Model dan Pola Pengimbasan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016.
- Simarmata, J. (2017). *Analisis Implementasi Penjaminan Mutu Di Sma Negeri 3 Kota Jambi*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(4), 54-62.
- Sukmadinata, Ns. (2006) *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (konsep, prinsip, dan Instrumen)*-bandung: PT Refika Aditama
- Simarmata, J. (2017). *Analisis Implementasi Penjaminan Mutu Di Sma Negeri 3 Kota Jambi*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(4), 54-62.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukardi. (2013). *Metode Penelitian Tindakan Kelas implementasi dan pengembangannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Suti, M. (2011). *Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan*. *Jurnal Medtek*, 3.